



## Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur

Khoir Akfina Didia✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel

Diterima Oktober 2015  
Disetujui Desember 2015  
Dipublikasikan Februari  
2016

#### Keywords:

Investmen, HDI, Labor  
Force Participation Rate,  
Population, Inequality,  
Convergence

### Abstrak

Permasalahan pembangunan yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu adalah ketimpangan pembangunan sebagai akibat dari adanya kegagalan sistem sentralistik yang menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, ketimpangan antara kota dan desa maupun ketimpangan antar sektor ekonomi dan ketimpangan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur dan mengetahui apakah terjadi proses konvergensi di Kawasan Kedungsepur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai 2013. Variabel penelitian ini adalah investasi, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan jumlah penduduk. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini diketahui bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur serta telah terjadi konvergensi di Kawasan Kedungsepur

### Abstract

*The development's problem faced in Indonesia time by time is inequality as a result from failure of the centralistic system which affected the widening of the gap between rich and poor, urban biased development, imbalance between economic sectors and regional inequality. This study aims to analyze what factors are affect on development inequality in Kedungsepur area and to know did convergence happen in Kedungsepur area. This study uses secondary data from the Central Statistics Agency of Central Java Province and Regional Investment Agency of Central Java Province from 2008 to 2013. The variables of this study are investment, human development index, labor force participation rate, and population. In this study, we used quantitative study methods by using multiple linear regression analysis with Ordinary Least Square method (OLS). The results of this study note that investment did not affect significantly on inequality of Kedungsepur area, HDI affects significantly on inequality of Kedungsepur area, labor force participation rate did not affect significantly on inequality of Kedungsepur area, and population affects significantly on inequality of Kedungsepur area and then there is convergence process in Kedungsepur area*

## PENDAHULUAN

Pendapatan daerah atau negara miskin akan tumbuh lebih cepat dari pada pendapatan daerah atau negara yang kaya maka pada akhirnya akan tercapai konvergensi tingkat pendapatan di antara daerah atau negara yang bersangkutan, dengan pengertian pendapatan di semua daerah atau negara akhirnya akan berada pada level yang sama.

Pritchett (1996, 1997) mengemukakan bahwa yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi dunia sebetulnya adalah divergensi yang pejal (massive) antara negara maju dan miskin. Pertumbuhan ekonomi yang cepat bukanlah hasil dari keadaan miskin melainkan merupakan hasil dari serangkaian kebijakan yang diciptakan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang cepat, sehingga yang penting untuk dilakukan dan diperhatikan adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pembangunan. Kebijakan ini harus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengarah pada konvergensi. Dengan demikian pemerintah mempunyai peran yang tidak kecil dalam memberikan berbagai bentuk dukungan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita di daerah-daerah yang terbelakang atau miskin. Kebijakan ekonomi adalah inovasi yang memiliki dampak penting bagi negara dan kesejahteraan sosialnya (Kogut & J. Muir, 2011)

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan di dalam perencanaan dan tujuan pembangunannya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk kawasan kerjasama antar daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan.

Menurut peraturan daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No.21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat pada bagian keenam yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas.

Kawasan Pengembangan Strategis adalah kawasan pengembangan yang mempunyai sumber daya yang produktif untuk dikembangkan baik tingkat regional maupun nasional, aglomerasi regional, posisi strategis, dan mempunyai implikasi terhadap pengembangan regional dan nasional.

Kawasan dalam konsep ini adalah ruang yang mempunyai entitas geografi yang terintegrasi dan faktor terkait, di mana batasan sistem tersebut tidak ditentukan oleh basis administrasi dan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi daerah. Kawasan Pengembangan Strategis juga meliputi area pertumbuhan dan perbatasan potensial yang memiliki akselerasi pertumbuhan yang berbeda sehingga dapat dikembangkan secara efektif (Kuncoro, 2004:216).

Pada awal pembangunan semua wilayah mempunyai pola pendapatan per kapita yang sama yaitu pola perkembangannya cenderung untuk terus naik, namun setelah beberapa tahun berjalan, ternyata tetap terjadi ketimpangan pendapatan antarwilayah karena kemampuan menciptakan pertumbuhan ekonomi masing-masing yang tidak seragam atau sangat bervariasi. Pemikiran ekonomi dan evolusi telah terjalin sepanjang sejarah mereka (Wilson & John, 2012)

Dari beberapa kawasan tersebut terdapat satu kawasan yang memiliki nilai ketimpangan pembangunan tinggi yaitu Kedungsapur. Padahal kawasan tersebut termasuk daerah yang mempunyai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi kedua dari ke delapan kawasan strategis setelah kawasan Wanarakuti. Ketimpangan pembangunan di Kedungsapur dapat dilihat dari data perhitungan nilai Indeks Williamson.

**Tabel 1.** Indeks Williamson Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

Kawasan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kedungsepur	0.75	0.76	0.74	0.74	0.75	0.75
Wanarakuti	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67
Subosukawonosraten	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36
Bregasmalang	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21
Petanglong	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
Barlingmascakep	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
Purwomanggung	0.30	0.30	0.34	0.35	0.35	0.35
Banglor	0.23	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah)

Berdasarkan tabel Indeks Williamson kawasan strategis provinsi Jawa Tengah di atas menunjukkan bahwa ketimpangan tertinggi dimiliki oleh kawasan Kedungsepur dengan IW pada tahun 2008 adalah 0,75, kemudian selanjutnya adalah Wanarakuti dengan IW sebesar 0,68, sedangkan ketimpangan terendah dimiliki oleh kawasan Banglor dengan IW sebesar 0,27. Ketimpangan di kawasan Kedungsepur sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 namun selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2013. Berbanding terbalik dengan Wanarakuti

yang sempat mengalami kenaikan ketimpangan pada tahun 2010 namun terus menurun pada tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2013. Tabel Indeks Williamson juga menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2013 ternyata ketimpangan pembangunan di Kedungsepur masih tinggi padahal tujuan pemerintah membentuk kawasan pengembangan strategis adalah sebagai solusi untuk mengurangi tingkat ketimpangan. Ketimpangan di kawasan Kedungsepur juga dapat dilihat dari data IPM berikut:

**Tabel 2.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur Tahun 2008-2013

Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Kendal	69.4	70.1	70.4	70.9	71.5	72.0	70.7
Demak	71.6	72.1	72.6	73.1	73.5	73.9	72.8
Kab Semarang	73.3	73.7	74.1	74.5	75.0	75.5	74.3
Semarang	76.5	76.9	77.1	77.4	78.0	78.5	77.4
Salatiga	75.8	76.1	76.5	76.8	77.1	77.5	76.6
Grobogan	70.2	70.6	70.8	71.3	71.8	72.4	71.1

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah)

Dari Tabel 2 bisa dilihat bahwa Kota Semarang adalah daerah yang memiliki IPM tertinggi sedangkan yang paling rendah adalah Kota Kendal. Hal ini mengidentifikasi bahwa terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan di wilayah Kedungsepur. Kota Semarang sendiri merupakan daerah administratif sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa

Tengah, sehingga dalam pembangunan daerahnya Kota Semarang paling majudibandingkan daerah lainnya yang ada di wilayah Kedungsepur. Perbedaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang maju, tingkat pendidikan yang tinggi sehingga menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan

tersedianya stock kapital juga tersedianya faktor-faktor produksi lainnya. Menurut Fitriyah dan Amin Pujiati (2016) ketimpangan terbesar di wilayah Kedungsepur terjadi di Kota Semarang dengan Indeks Williamson sebesar 0,61. Hal ini sesuai dengan teori Neo Marxist yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan tingkat kesenjangan. Uang memiliki bahan mitra, seperti uang kertas atau koin, dan ungkapan yang ideal, unit moneter (Rosenblatt & Martinás, 2008).

Usaha kerjasama melalui pembentukan kawasan strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melihat dari kesamaan karakteristik dari setiap Kabupaten/Kota agar bisa bekerjasama dengan lebih baik dan membentuk sinergisitas agar daerah-daerah tersebut dapat saling melakukan hubungan timbal balik atas kebutuhan dan kelebihan pada masing-masing daerah dalam satu kawasan sehingga diharapkan dapat terjadi pemerataan pendapatan. Namun yang terjadi adalah masih terjadi ketimpangan yang tinggi yaitu pada Kawasan Kedungsepur.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, data yang diteliti meliputi data investasi, IPM, TPAK, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat ketimpangan dan pertumbuhan PDRB per kapita, sedangkan variabel independennya adalah investasi, IPM, TPAK, dan jumlah penduduk. metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanaman Modal

Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (pooled data). Menurut Gujarati (2010:237) data panel (pooled data) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan time series. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan dianalisis menggunakan model regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Model regresi terkait pengaruh investasi, IPM, TPAK dan jumlah penduduk terhadap tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur menggunakan model regresi linier berganda metode OLS (Ordinary Least Square). Persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KTMPGN = \alpha_i + \beta_1 \log INVST_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 \log JP_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$KTMPG = -6.308565 - 0.001823 \log INVST_{it} + 0.056588 IPM_{it} + 0.004441 TPAK_{it} + 0.156878 \log JP_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Metode Ordinary Least Square

Variabel	Koefisien	Std. Error	Probabilitas	R-Squared
C	-6.308565	0.669405	0.0000	
LOG(INVST)	-0.001823	0.003925	0.6456	
IPM	0.056588	0.005490	0.0000	0.834567
TPAK	0.004441	0.004092	0.2862	
LOG(JP)	0.156878	0.023104	0.0000	

Nilai konstanta atau intersep yang signifikan secara statistik dan negatif, menunjukkan bahwa apabila variabel lain dalam model dianggap nol, maka tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur adalah sebesar -6,30 persen. Nilai konstanta yang negatif tersebut

menunjukkan ada indikasi Kawasan ini belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu terbukti dengan adanya ketimpangan di Kawasan Kedungsepur ini pada tahun 2008-2013 yaitu sebesar 0,75 yang berarti bahwa terjadi ketimpangan yang tinggi di Kawasan Kedungsepur.

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara langsung investasi tidak berpengaruh signifikan dengan koefisien -0,001823 terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memicu tumbuhnya investasi di daerah masih perlu ditingkatkan lagi yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan. Hal ini tidak sesuai dengan temuan Tambunan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara investasi terhadap ketimpangan pembangunan. Namun hasil dari penelitian ini sesuai dengan temuan dari penelitian Yuki Angelia (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara investasi dengan ketimpangan, semakin banyak investasi yang digunakan untuk proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan per kapita (Sadono Sukirno, 1985).

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,056588 terhadap tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila IPM mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,056588%. Selama tahun 2008-2013, Kawasan Kedungsepur termasuk pada level sedang dalam pembangunan manusia. Artinya daerah Kedungsepur mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. Namun koefisien regresi yang positif berarti bahwa peningkatan pada IPM justru menyebabkan peningkatan besarnya ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Hal ini dimungkinkan jika daerah-daerah yang mengalami peningkatan IPM adalah daerah-daerah yang justru sudah

memiliki IPM yang tinggi sehingga akan makin memperlebar perbedaan dalam masyarakat dan berakibat pada makin meningkatnya ketimpangan pembangunan.

Pada tahun 2008-2013 IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang, hal ini karena menurut Linda Tustiana (2013) berdasarkan analisis Location Question, Shift Share, Tipologi Klasen, dan Skalogram karakteristik pola pertumbuhan Kota Semarang termasuk daerah maju dan cepat berkembang sehingga pembangunannya dapat berlangsung dengan lebih baik dengan fasilitas yang semakin baik. Meskipun daerah lain di Kawasan Kedungsepur juga terus mengalami peningkatan IPM, namun daerah dengan IPM yang lebih baik sebelumnya juga mengalami peningkatan. Hasil ini sesuai dengan teori Tambunan dan juga mendukung penelitian yang dilakukan Herwin Mopangga (2011) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel TPAK berhubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alpha 5% dengan koefisien sebesar 0,004441 terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila TPAK mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan tingkat ketimpangan sebesar 0,004441%. Hal ini sesuai dengan teori Sjafrizal yang menyatakan bahwa akibat dari adanya migrasi yang kurang lancar, menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,156878 terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah penduduk mengalami

kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0,156878. Hal ini sesuai dengan teori Tambunan yang menyatakan bahwa struktur kependudukan akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Nurlaili (2015) di mana jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang meningkatkan ketimpangan apabila sebaran populasi penduduk tidak merata. Tidak meratanya jumlah penduduk yang menempati wilayah tertentu akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut.

Estudillo (1997: 65) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan merupakan kombinasi dari pendapatan masyarakat kota dan desa, di mana umumnya pendapatan masyarakat kota lebih besar dikarenakan keanekaragaman kegiatan kelompok masyarakat di perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan akan membuat distribusi pendapatan semakin besar. Selain itu, meningkatnya penduduk yang terampil dan terpelajar yang bermigrasi ke kota menjadikan desa kekurangan SDM handal yang justru diharapkan mampu membangun perekonomian desa.

Berdasarkan penghitungan konvergensi sigma dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses konvergensi sigma di Kawasan Kedungsepur yang ditandai dengan dispersi dari pertumbuhan pendapatan per kapita yang semakin menurun. Hal ini sesuai dengan teori neoklasik yang menyatakan bahwa setiap wilayah (daerah) bergerak menuju (konvergen) satu level pertumbuhan ekonomi tertentu karena terjadi keseimbangan penguasaan faktor-faktor produksi antar wilayah (daerah).

Konvergensi sigma juga mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Kawasan Kedungsepur mengalami pertumbuhan yang positif. Selain itu, konvergensi sigma juga menyatakan bahwa untuk mengurangi tingkat kesenjangan tidak dapat dilakukan secara cepat dan membutuhkan suatu proses yang lama, sehingga diperlukan pembangunan yang menyeluruh di seluruh kabupaten/kota untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kesenjangan seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pendidikan, pertanian, kesehatan seperti yang telah dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang bahwa pembangunan infrastruktur (public capital) memiliki pengaruh yang besar (positif dan signifikan) untuk meningkatkan output per kapita di seluruh provinsi di kedua negara tersebut (Shaoji, 2001).

Berdasarkan penghitungan konvergensi mutlak disimpulkan tidak terjadi proses konvergensi absolut antar wilayah Kedungsepur untuk periode 2008-2013. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien parameter pendapatan per kapita awal yang memiliki arah (sign) positif, atau memiliki nilai lebih besar dari satu.

Berdasarkan penghitungan konvergensi kondisional disimpulkan telah terjadi proses konvergensi kondisional antar wilayah Kedungsepur untuk periode 2008-2013. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien parameter pendapatan per kapita awal lebih kecil dari satu. Kecepatan konvergensi pendapatan per kapita adalah 0,066271 yang mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita kabupaten/kota terutama daerah yang berpendapatan rendah harus tumbuh minimal 6,63% pertahun agar perekonomian dapat mencapai titik *steady state*.

Tidak terjadi konvergensi absolut antar wilayah di Kawasan Kedungsepur namun terjadi konvergensi kondisional antar wilayah di Kawasan Kedungsepur. Hal ini mendukung hipotesis Pritchett dan Teori Pertumbuhan Endogen yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat bukanlah hasil dari keadaan miskin melainkan merupakan hasil dari serangkaian kebijakan yang diciptakan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang cepat.

Untuk menutupi separuh ketimpangan pendapatan perkapita yang terjadi, dibutuhkan waktu selama 10,41 tahun. Jadi, untuk menutupi secara keseluruhan ketimpangan pendapatan per kapita dibutuhkan waktu 20,82 tahun dengan syarat pendapatan per kapita harus meningkat setidaknya sebesar 6,63% per tahunnya.

## SIMPULAN

Investasi berhubungan negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berhubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur.

Telah terjadi konvergensi sigma di Kawasan Kedungsepur dengan nilai dispersi dari tahun 2008-2013 yang mengalami penurunan secara signifikan. Artinya secara agregat Kawasan Kedungsepur sudah mengalami proses penyempitan kesenjangan. Konvergensi absolut tidak terjadi namun terjadi konvergensi kondisional di Kawasan Kedungsepur berarti sesuai dengan temuan Pritchett. Lama waktu (half-life) yang dibutuhkan oleh Kawasan Kedungsepur untuk mencapai titik steady state yang sama adalah 10,41 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Angelia, Yuki. 2010. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Arifin, Zaenal. 2009. "Kesenjangan dan Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten Pada Empat Koridor di Propinsi Jawa Timur". Humanity. Hal. 154-164.
- Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE-YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-5, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Jawa Tengah Dalam Angka. Tahun 2008-2013.
- Barro, Robert J and Xavier Sala-i-Martin. 1995. "Economic Growth". New York : Mc Graw Hill Inc.
- Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 8(1).
- Emilia dan Imelia. 2006. Modul Ekonomi Regional. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Estudillo, Jonna P. 1997. "Income Inequality in The Philippines, 1961-1991". The Developing Economies. Vol 35(1).
- Fitria, E. 2006. Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Pulau Jawa [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Fitriyah dan Amin Pujiati. 2015. "Determinant of Economics Growth in Kedungsepur Region". *Economics Development Analysis Journal*. Vol 5(2).
- Fitriyah, Lailatul dan Lucky Rachmawati. 2012. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur". Jurnal Fakultas Ekonomi. UNESA. Surabaya.
- Gujarati, Damodar N. 2010. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Budiantoro. 2008. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah". Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- John, David Sloan & David Sloan. 2013. Evolution as a general theoretical framework for economics and public policy. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 90, Supplement, Pages S3-S10
- Kogut, Bruce & J. MuirMacpherson. 2012. The mobility of economists and the diffusion of policy ideas: The influence of economics on national policies. *Research Policy*, Volume 40, Issue 10, Pages 1307-1320
- Komang Ayuk Pebriani dan I Wayan Sukadana. 2013. "Konvergensi Pendapatan Per Kapita : Studi Kasus Antar Kabupaten di Indonesia pada Era Otonomi Daerah". E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.
- Kuncoro, Mudrajad, Ph.D. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan dan Peluang. Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2006. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. 2003. Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Mopangga, Herwin. 2011. "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo". *Trikonomika*. Vol 10(1).
- Nurlaili, Ani. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No.21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Pritchett, L., Forget Convergence: Divergence Past, Present, and Future (<http://worldbank.org/fandd/english/0696/articles/090696.htm>), 1996.
- Puspitawati, Linda Tustiana. 2013. "Analisis Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur". *Economics Development Analysis Journal*. Vol 2(2).
- Rahman, Yozi Aulia. 2012. "Pengaruh Pengeluaran Investasi Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita di Indonesia". *Tesis*. Magister Sains dan Doktor Universitas Gadjah Mada.
- Rosenblatt, J & K.Martinás. 2008. Inequality indicators and distinguishability in economics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Volume 387, Issues 8-9, Pages 2047-2054
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang-Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sufii, S. 2008. *Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 1985-2006*. Thesis. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tajerin, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Lucky Adrianto. 2013. "Tendensi Proses Konvergensi dan Penentu Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Utama di Indonesia". *J. Sosek KP* Vol. 8 No. 2.
- Tambunan, T. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. dan S. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Ed ke-9. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, I.G.A.P., Sukarsa, M., Yuliarmi, N. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Bali: Universitas Udayana.
- Widiyati, Sri. 2011. *Pengembangan Ekonomi Kabupaten Semarang Melalui Wilayah Andalan*. Vol.7 No.1. Hal 1-5. Semarang: POLINES.
- Wibisono, Yusuf. 2003. *Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 52-83.
- Wiyati, R.B. 2004. *Analisis Konvergensi Pembangunan Antardaerah (Studi Kasus: Percepatan Pemerataan Pembangunan di Jawa Tengah 1993-2000)*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.